

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Terima Hasil WTP atas LHP BPK 2023, Bupati Barru: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Berkontribusi, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/05/27/terima-hasil-wtp-atas-lhp-bpk-2023-bupati-barru-terima-kasih-untuk-semua-pihak-yang-berkontribusi>

Sejarah tercipta, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si menjadi Bupati Barru Pertama yang konsisten sapu bersih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama defenitif memimpin Barru.

Pencapaian konsisten berintegritas dalam Delapan Tahun mengelola Pemda Barru, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke Kantor Perwakilan Makassar untuk menerima Opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Tahun 2023.

Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh M.Si bersama Ketua DPRD Barru Lukman T menandatangani berita acara serah terima LHP, dihadapan Kepala BPK Perwakilan Makassar, DR. Amin Adab Bangun, SE, M.Si, AK, CA,CSFA, ACPA, CFrA, di Kantor Perwakilan BPK RI di Makassar, Senin (27/5/2024).

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Makassar, Amin Adab Bangun menyampaikan dasar pemeriksaan sebelum mengumumkan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023, berupa Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“BPK bekerja dengan anggaran negara yang outputnya adalah LHP, yang diserahkan sesuai aturan ke Daerah, ada Empat hal mendasar yang diperiksa, yakni konsistensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan informasi dalam laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan LKPD, dan efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)”, sebut Kepala Perwakilan BPK Makassar.

Dirinya menyebut bahwa Faktor yang mempengaruhi Opini adalah konsistensi sedangkan Opini yang berubah bagi Daerah dapat berdampak luas bagi penerimaan daerah dan hal lainnya.

“BPK memberikan Opini WTP kepada Kabupaten Barru, Wajar Tanpa Pengecualian, ini yang kesepuluh kali”, sebut Kepala Perwakilan BPK Makassar mengumumkan yang disambut apresiasi tepuk tangan dari segenap hadirin.

Mewakili Kabupaten/Kota yang hadir menerima LHP LKPD Se-Provinsi Sulsel Tahun 2023, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si, didaulat memberikan sambutan lalu memulai dengan menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada BPK yang telah konsisten membina dan memeriksa hasil kinerja Pemda.

“Terima kasih atas pembinaan dan hasil pemeriksaan BPK selama ini dan Opini WTP kali ini merupakan WTP kesepuluh bagi Barru dan jadi yang kedelapan sejak kami memimpin, Alhamdulillah, kami secara konsisten memanfaatkan hasil pemeriksaan Auditor BPK dari tahun ke tahun untuk memperbaiki administrasi, memperbaiki pengelolaan, dan transparansi keuangan termasuk dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan”, sebut Bupati Barru.

Diketahui, sejak awal tahun kepemimpinannya hingga tahun kedelapan ini konsisten menyapu bersih pengakuan WTP, padahal sebelum menakhodai Barru, Tahun sebelumnya di 2015, Barru mendapatkan Opini Tidak Wajar.

“Terima kasih kepada semua Pihak, teristimewa kepada Auditor Profesional BPK dan tentunya sinergitas harmonis semua Pejabat di Daerah dan Semua ASN sehingga kita mempertahankan Opini WTP ini”, ungkap Suardi Saleh dalam testimoni publiknya dihadapan Pejabat BPK dan beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pemda Barru yang hadir.

Turut hadir, Pimpinan Daerah dan Ketua DPRD yang diantaranya adalah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Pangkep, bersama jajaran Auditor BPK dan para pejabat lainnya.

Bupati Barru menutup sambutannya dengan khas, diungkapkannya ‘Pappaseng To Riolo’ sebagai motivasi bijak.

“Dua mi riala Sappo, masedinna unganna panasae, maduanna belona kanukue yang bisa dimaknai bahwa ada dua hal yang menjadi keutamaan dalam menjalani pemerintahan, yang pertama adalah Lempu atau jujur, dan yang kedua yakni seperti bahasa Bugis hiasan kuku yakni paccing atau bersih suci”, tutup Suardi Saleh.

Sumber Berita:

1. <https://topnews1.online/barru-total-10-kali-wtp-delapan-opini-di-era-suardi-saleh/> 27 Mei 2024
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/27/terima-hasil-wtp-atas-lhp-bpk-2023-bupati-barru-terima-kasih-untuk-semua-pihak-yang-berkontribusi> 27 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.